

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tentang bagaimana pengelolaan dana desa dan juga pengelolaan BUMDes di Desa Karanglewas Kidul untuk meningkatkan optimalisasi daya saingnya. Penelitian ini juga mengungkap manfaat dari adanya dana desa dan juga BUMDes di Desa Karanglewas Kidul bagi masyarakat setempat. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul

Pengelolaan dana desa di Desa Karanglewas Kidul sama seperti pengelolaan dana desa di desa-desa lainnya, karena mengikuti peraturan dan ketetapan dari pemerintah pusat. Dana desa diterima sejak adanya UU tentang desa, yaitu tahun 2014 dan Pemerintah Desa Karanglewas Kidul baru menerima dana desa mulai dari tahun 2015. Adapun mekanisme pencairan dana desa hingga peruntukannya juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun dengan merujuk diadakannya musdes atau musrenbangdes untuk menentukan prioritas pembangunan desa dan kegiatan desa di tahun selanjutnya. Adapun musdes atau musrenbangdes dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh unsur perwakilan dari masyarakat dan diputuskan bersama dengan BPD (Badan Pengawas Desa).

Pengelolaan dana desa di Desa Karanglewas Kidul tidak ditemukan kendala. Meskipun tidak ada kendala dalam pengelolaannya, Pemerintah Desa Karanglewas Kidul tetap harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan selalu menjaga simbol integritas sebagai penyelenggara pemerintahan entitas publik.

Dana desa di Desa Karanglewas Kidul juga mempunyai beberapa manfaat bagi masyarakat. Informan yang dipilih dalam penelitian ini sebagai masyarakat juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan dalam hal pelayanan, fasilitas, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Karanglewas Kidul termasuk dalam kategori sangat baik dan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Kendati demikian sebagai entitas publik maka Pemerintah Desa Karanglewas Kidul harus menerapkan keterbukaan terhadap publik dalam hal urusan kegiatan pemerintahan.

Selain itu pada peruntukkan dana desa bagi BUMDes dapat disimpulkan bahwa tidak optimal, karena dari Pemerintah Desa Karanglewas Kidul tidak mengusahakan cara-cara agar dengan modal tersebut BUMDes supaya dapat berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan hampir 3 tahun pendirian BUMDes tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya strategi dan perencanaan yang matang sejak pendirian BUMDes tersebut, sehingga menyebabkan BUMDes tidak memiliki daya

saing dengan BUMDes-BUMDes lainnya. Meskipun unit usahanya belum berjalan, namun pengelola BUMDes memiliki rencana jangka panjang dalam kegiatan unit usahanya, yaitu usaha penggemukan sapi. Penyertaan modal yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Karanglewas Kidul juga memberikan gambaran bagi BUMDes untuk merincikan berapa ekor sapi yang akan dipelihara dan dilakukan penggemukan. Adapun jumlah ekor sapi yang akan dilakukan penggemukan dan pemeliharaan yaitu sejumlah minimal dua puluh ekor sapi jantan. Dipilih sapi jantan karena dianggap produktif daripada sapi betina oleh kelompok peternak sapi tersebut. Berbagai kejadian dan peristiwa yang dialami oleh kelompok peternak sapi tersebut dapat menjadi acuan dan sebagai tolok ukur untuk pengelolaan BUMDes penggemukan sapi tersebut. Selain itu kelompok peternak sapi tersebut adalah calon mitra BUMDes Mitra Rejo Makmur.

2. Pengelolaan BUMDes Mitra Rejo Makmur Desa Karanglewas Kidul Untuk Meningkatkan Daya Saingnya

BUMDes Mitra Rejo Makmur yang menjadi salah satu unit usaha desa di Desa Karanglewas Kidul ini sudah berdiri sejak tahun 2019, namun baru mendapat anggaran dana desa sejak tahun 2020 hingga sekarang (2022). Adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDesnya yaitu penggemukan sapi. Namun hingga saat ini (2022) unit usaha yang dikelola BUMDes belum berjalan, sehingga belum optimal dan belum memiliki daya saing. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan dan pengelolaan sapi masih dalam tahap pembangunan.

Adapun target dari pemerintah desa, tahap pembangunan sarana dan prasarana untuk membuka unit usaha BUMDes yaitu selesai tahun ini (2022) dan mulai berjalan yaitu pada tahun selanjutnya (2023).

BUMDes Mitra Rejo Makmur pada awal usahanya nanti berjalan memiliki rencana untuk memelihara sebanyak minimal dua puluh ekor sapi. Harapan dari pengelola BUMDes yaitu adanya penambahan jumlah sapi yang dipelihara dan adanya pelatihan pengelolaan ternak sapi dari dinas-dinas terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelola BUMDes dapat meningkatkan optimalisasinya dan mampu bersaing dengan unit usaha serupa di sekitarnya. Saat ini, BUMDes Mitra Rejo Makmur berkaca pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kelompok peternak sapi di Desa Karanglewas Kidul. Hal ini dimaksudkan agar ketika program penggemukan sapi sudah dimulai dan sudah dilaksanakan dapat berjalan lancar dan dapat meminimalisir resiko kerugian yang timbul.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes Mitra Rejo Makmur juga masih banyak dan perlu perbaikan untuk pengembangan BUMDes yang lebih baik. Kendala-kendala yang dimaksud yaitu adanya masalah internal antara pengelola BUMDes dengan pengelola dana desa, tidak adanya pemantauan langsung dari desa, dan masalah-masalah lainnya yang bisa mengganggu keberhasilan dan optimalisasi daya saing BUMDes. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya implikasi-implikasi selama penelitian, dapat menjadikan pengembangan BUMDes untuk lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

BUMDes Mitra Rejo Makmur ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan keberlangsungan unit usaha BUMDes. Selain itu juga sangat diperlukan untuk mengembangkan inovasi-inovasi dan perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT yang lebih matang lagi untuk mengembangkan usaha penggemukan sapi ini maupun mendirikan unit usaha lainnya yang lebih berpotensi dan lebih menjanjikan keuntungannya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa masalah yang ada pada pengelolaan dana desa dan juga pengelolaan BUMDes. Oleh karenanya ada beberapa implikasi untuk pengembangan dan menjadi solusi atas masalah tersebut di kemudian hari. Adapun implikasi-implikasi penelitian tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Karanglewas Kidul sebagai pihak entitas publik yang mengelola dana desa tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan dan pemerintahan desa haruslah selalu mengedepankan musyawarah terbuka bersama seluruh elemen perwakilan dari masyarakat. Mengumumkannya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa juga perlu dilakukan untuk menghindari banyaknya peserta yang merupakan perwakilan dari elemen tersebut tidak hadir. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa. Sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan yang

menyebabkan terhambatnya suatu program yang penting bagi desa. Pemerintah desa juga harusnya memiliki tanggungjawab penuh untuk mendukung dalam mengoptimalkan dana desa yang dianggarkan untuk BUMDes serta untuk meningkatkan daya saingnya. Adapun contohnya yaitu mengadakan pelatihan, mengadakan sosialisasi, membantu dan mengawasi BUMDes, dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Karanglewas Kidul bersama pengelola BUMDes Mitra Rejo Makmur dan masyarakat hendaknya harus selalu bersinergi bersama untuk meningkatkan PAD. Selain itu, Pemerintah Desa Karanglewas Kidul harus mempertahankan kualitas pelayanan dan fasilitasnya untuk kenyamanan masyarakat. Apabila di kemudian hari ditemukan masalah atau kendala, hendaknya langsung dievaluasi dan diperbaiki untuk kedepannya.

2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa Mitra Rejo Makmur harus menata ulang manajemennya dan perencanaan bisnisnya. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMDes Mitra Rejo Makmur dapat segera memulai usahanya dengan cepat untuk mengelola anggaran dana desa tersebut supaya memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Adapun caranya yaitu mengajak Pemerintah Desa Karanglewas Kidul, kelompok peternak sapi, masyarakat sekitar, dinas-dinas terkait di Banyumas dan mengajak pihak ketiga untuk bekerjasama dalam usaha penggemukan sapi dengan sistem bagi hasil. Adapun cara lainnya yaitu bisa dengan melakukan studi banding terhadap BUMDes desa lainnya yang memiliki

unit usaha serupa. Hal ini dimaksudkan agar pengelola BUMDes Mitra Rejo Makmur dapat melakukan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) terhadap manajemen usahanya. Dengan perencanaan bisnis yang matang dan manajemen yang unggul serta adanya kerjasama dengan pihak eksternal maka sangat memungkinkan BUMDes Mitra Rejo Makmur dapat berkembang pesat dan terjadi peningkatan daya saingnya di tahun-tahun pertamanya menjalankan usaha penggemukan sapi. Mengingat Desa Karanglewas Kidul sangat berpotensi untuk melakukan bisnis apapun.

3. Adapun untuk masyarakat desa hendaknya harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas desa, termasuk memberikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Karanglewas Kidul.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Harapannya bagi peneliti selanjutnya adalah bisa mengatasi keterbatasan pada penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada informan yang sulit dihubungi untuk dilakukan wawancara, padahal informan ini merupakan salah satu pihak yang berperan dalam mengelola dana desa di Desa Karanglewas Kidul.
2. Pada saat ini, yaitu tahun 2022 BUMDes Mitra Rejo Makmur belum berjalan, sehingga model bisnisnya menurut pengelola BUMDes tersebut belum terbentuk. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat diadakan

lagi dengan hal yang sama dan untuk memantau perkembangan lanjutan dari model bisnis pengelolaan BUMDes.

3. Jumlah informan penelitian selanjutnya diharapkan bisa melebihi dari penelitian ini. Fungsinya untuk menghasilkan informasi dari berbagai sumber sehingga hasilnya lebih akurat lagi karena adanya berbagai sudut pandang para informan yang lebih banyak.
4. Informan masyarakat hanya satu orang, padahal seharusnya minimal tiga orang. Namun karena beberapa alasan, sehingga diputuskan hanya mewawancarai satu orang informan masyarakat. Sehingga informasi yang didapat hanya dari perspektif satu orang saja dan tidak mengetahui perspektif dari masyarakat lainnya.

